

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun oleh:

NATASHA AYU KUSUMANINGRUM

11.15.28299

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

AGUSTUS 2019

SKRIPSI

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NATASHA AYU KUSUMANINGRUM

No Induk Mahasiswa: 1115 28299

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

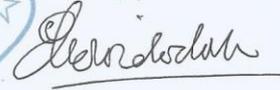
Susunan Tim Penguji:

Pembimbing I



Baldric Siregar, Dr., MBA., CMA., Ak., CA.

Penguji



Eko Widodo Lo, Dr., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II



Prima Rosita Arini S., S.E., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

NATASHA AYU KUSUMANINGRUM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KEUANGAN PAHLAWAN NEGARA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh yang dimiliki oleh PAD, DAU, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari 35 kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dengan periode 2013-2017 dan data kependudukan yang didapatkan dari BPS Jawa Tengah. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Selanjutnya, DAU juga memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja daerah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh variabel jumlah penduduk, variabel jumlah penduduk tidak menunjukkan hubungan yang positif terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini, terbukti bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2017.

Kata kunci: PAD, DAU, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah, *Flypaper effect*.

ABSTRAC

The purpose of this study is to test and to prove empirically the effects of local revenue (PAD), general allocation fund (DAU), and population of Central Java province to regional expenditure. The population and sample of data in this study was the realization of budget reports from 35 districts/cities in Central Java within the period of 2013-2017 and the source of data of the population is from BPS Central Java. The data were analyzed using multiple linear regressions. The result shows local revenue and general allocation fund has a positive influence to regional expenditure. Meanwhile, finding on population has no influence to regional expenditure. The flypaper effect are found on Central Java province within the period of 2013-2017.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund, Population, Regional Expenditure, Flypaper effect.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah mengenai pembangunan daerah dan peningkatan kemandirian daerah mengenai dasar hubungan kewenangan dan hubungan keuangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2. Selain disebutkan dalam pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, teknis mengenai pengelolaan dan aturan mengenai antar-tingkat pemerintahan yang baru muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah bersama dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Setelah itu, disahkan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, amandemen undang-undang tersebut dilakukan atas dasar berbagai kritik dan tanggapan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menunjang perbaikan undang-undang sebelumnya dengan aspek-aspek yang membuat penetapan otonomi daerah menjadi optimal.

Keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini merujuk kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk membangun dan memandirikan daerah, lebih lanjut disebutkan di dalam nawacita ketiga. Pengimplementasian nawacita ketiga ini hadir dalam bentuk kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah suatu pemindahan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didalam pelaksanaannya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kemudian didasarkan kepada asas otonomi. Otonomi daerah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom untuk melakukan pengaturan dan mengurus secara mandiri yang menjadi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin daerah, segala pengeluaran yang dilakkan oleh daerah hadir dalam bentuk belanja daerah. Sumber pembiayaan yang digunakan daerah untuk melaksanakan kegiatan rutinnya didapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersusun atas (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Sumber pembiayaan lain yang didapatkan oleh daerah melalui pemerintah pusat salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang dimiliki antardaerah, selain itu DAU adalah diberikan untuk membantu mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Penduduk menjadi salah satu unsur penting dalam suatu daerah. Di dalam konteks pembangunan daerah dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, penduduk dapat menjadi suatu beban ataupun suatu aset, hal tersebut bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menyusun dan mengelola keuangan daerahnya.

Dalam perjalanan peningkatan kemandirian daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kesiapan yang dimiliki setiap daerah dalam merespon kebijakan tersebut tidaklah sama. Ketidaksiapan ini memunculkan fenomena *flypaper effect*. *Flypaper effect* adalah suatu fenomena dimana pemerintah daerah dalam hal pembiayaan belanja daerahnya lebih bergantung atau

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lebih banyak menggunakan dana transfer yang diterima melalui pemerintah pusat yakni DAU daripada menggunakan PAD daerah tersebut.

Penelitian terkait fenomena *flypaper effect* terhadap PAD dan DAU yang mempengaruhi belanja daerah telah dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009), dan Muid dan Saputri (2014). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan data daerah penelitian pada provinsi Jawa Tengah dengan periode tahun 2006-2008 dan periode 2012-2013. Kedua penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah dan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bukti empiris bahwa fenomena *flypaper effect* benar telah terjadi pada provinsi Jawa Tengah pada rentang periode 2006-2008 dan periode 2012-2013.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan memberi bukti empiris pengaruh yang dimiliki oleh PAD, DAU, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah dan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada provinsi Jawa Tengah dengan periode pengujian 2013-2017.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah suatu pendapatan pemerintah daerah yang didapatkan melalui pungutan yang didasarkan kepada peraturan daerah yang kemudian disesuaikan kepada peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan yang menjadi komponen PAD adalah (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pemberian PAD, menurut UU No. 33 Tahun 2004 memiliki tujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pemberian kewenangan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sebagai perwujudan akan pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, DAU adalah bagian dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, melalui pemberian DAU ini pemerintah pusat bertujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sehingga dalam proses daerah melaksanakan desentralisasi, daerah mampu untuk mendanai keuangannya sendiri. Besaran nilai DAU yang diterima oleh daerah adalah sekurang-kurangnya sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang telah ditetapkan didalam APBN, besaran nilai ini merujuk kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Formula pengalokasian DAU terhadap suatu daerah dilakukan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Pengalokasian DAU dengan dasar celah fiskal dilakukan saat kebutuhan fiskal suatu daerah kemudian dikurangkan dengan kapasitas fiskal daerah.

Jumlah Penduduk

Pengertian dari penduduk dalam ruang lingkup negara Indonesia menurut BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki suatu tujuan untuk menetap. Tingkat pertumbuhan penduduk menurut (Social, 2011) disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, fertilitas,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mortalitas, dan migrasi. Faktor fertilitas ini cakupannya lebih kepada banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Selain dipengaruhi oleh fertilitas, faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah mortalitas atau kematian. Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi perubahan dalam penduduk adalah migrasi. Migrasi adalah suatu proses dimana penduduk suatu daerah berpindah ke daerah lain yang memiliki tujuan untuk menetap, yang perpindahan yang dilakukannya melampaui politik/negara ataupun melampaui batas administratif suatu negara.

Belanja Daerah

Pengertian tentang belanja daerah merujuk kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 2 yaitu bahwa belanja daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang berasal dari rekening kas umum masing-masing daerah dengan melakukan pengurangan terhadap ekuitas dana, belanja daerah adalah suatu kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh lagi oleh daerah. Pengelompokan belanja daerah mengikuti aturan yang telah tertera di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu dibagi ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, pembagian yang tertera dalam Permendagri ini penggunaannya lebih menekankan kepada penganggarannya.

Belanja tidak langsung adalah suatu bagian dari belanja daerah yang penganggaran dananya tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung adalah sebagai berikut: (1) belanja pegawai, (2) bunga, (3) subsidi, (4) hibah, (5) bantuan sosial, (6) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, (7) belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah suatu bagian dari belanja daerah yang penganggaran dananya memiliki keterkaitan secara langsung kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja modal.

Teori *Flypaper Effect*

Flypaper effect adalah suatu fenomena yang terjadi ketika pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan terhadap program dan kegiatannya lebih banyak menggunakan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan melakukan peningkatan kemandirian keuangan daerah daripada menggunakan dana yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yaitu PAD (Kusumadewi dan Rahman, 2007) . Terminologi mengenai *flypaper effect* di dalam Oktavia (2014) dikaitkan dengan suatu obsevasi yang menyatakan bahwa “*money stick where it hits*”.

Fenomena *flypaper effect* merujuk kepada (Mulya dan Bustamam, 2016) disebutkan dapat terjadi dalam dua versi, hal pertama ditunjukkan oleh peningkatan berlebihan yang terjadi kepada pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah, kedua ditunjukkan pada hal yang mengarah kepada elastisitas pada pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dasar yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya *flypaper effect* pada suatu pemerintah daerah dilihat melalui perbandingan antara pengaruh yang dimiliki oleh PAD dan DAU terhadap belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun APBD dan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk membiayai kegiatan belanja daerah dan dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 1 mengenai prinsip kebijakan perimbangan keuangan ditegaskan tentang tujuan yang dimiliki oleh PAD tersebut. Oleh sebab

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

itu, daerah diharapkan dapat menggali potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan peningkatan PAD dan mampu membuat PAD sebagai sumber utama pendapatan yang dimiliki suatu daerah. Penelitian terkait pengaruh PAD terhadap belanja daerah telah dilakukan oleh Maimunah (2006), Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009), Pramuka (2010), Sasana (2011), Muid dan Saputri (2014).

H₁: PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah

Dana alokasi umum (DAU) adalah bagian dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bersamaan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dijelaskan didalam UU No. 23 Tahun 2014, dana perimbangan hadir sebagai konsekuensi atas penyerahan urusan pemerintahan dan diterima daerah yang kemudian dilaksanakan dengan asas otonomi. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Departemen Keuangan (2009) menyatakan daerah dengan potensi fiskal yang bernilai kecil, namun memiliki kebutuhan fiskal yang besar akan menerima alokasi DAU yang relatif besar dan sebaliknya. Secara tidak langsung, maksud dari pernyataan diatas adalah DAU digunakan sebagai instrumen pemerataan kapasitas fiskal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009), Pramuka (2010), Muid dan Saputri (2014), Devita, Delis dan Junaidi (2014), Oktavia (2014) menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H₂: DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah

Sebagai bagian dari subjek pembangunan, peningkatan yang terjadi terhadap jumlah penduduk menuntut berbagai pihak, salah satunya pemerintah untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari sisi kualitas serta kuantitas yang manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran akan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan yang terjadi terhadap jumlah penduduk suatu daerah, membawa pengaruh salah satunya terhadap banyaknya anggaran belanja yang harus dialokasikan oleh pemerintah masing-masing daerah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah diharapkan dapat dikendalikan lajunya oleh pemerintah daerah, sehingga nilai anggaran belanja daerah tidak mengalami peningkatan secara signifikan, terlebih pada pemerintah daerah dengan kondisi negara berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011) membuah hasil bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif terhadap belanja daerah dan dapat mempengaruhi belanja daerah. Selain penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian oleh Fitriana dan Sudarti (2018) dengan salah satu fokusnya tentang pengaruh yang dimiliki oleh jumlah penduduk terhadap belanja modal, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa, jumlah penduduk terkait hubungan yang dimiliki terhadap belanja modal adalah positif dan signifikan. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka untuk menguji pengaruh yang dimiliki oleh jumlah penduduk terhadap belanja daerah hipotesis yang disimpulkan adalah:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H₃: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, populasi juga berfungsi sebagai sampel untuk menunjang penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menentukan populasi penelitian adalah laporan realisasi APBD setiap kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah yang telah dipublikasikan didalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan nilai pada PAD, DAU, dan belanja daerah tidak bernilai nol (0) ataupun minus (-). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, hasil pengumpulan dan seleksi data penelitian seluruh kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017 data yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian adalah sebanyak 175 data. Dalam proses pengolahan data, peneliti melakukan transformasi terhadap data yang digunakan menggunakan ln, hal yang melatarbelakangi adalah karena adanya perbedaan satuan antara variabel dalam penelitian ini. Pentranformasian data menggunakan ln juga memiliki tujuan agar data yang digunakan tidak memiliki jarak nilai yang terlalu besar dan hasil yang didapatkan dapat merepresentasikan data yang digunakan dalam penelitian secara utuh.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel ditunjukkan dalam tabel 1 di bawah ini:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 1.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data	Satuan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Variabel Independen)	Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sumber data PAD adalah Laporan realisasi APBD periode 2013-2017.	Rupiah
Dana Alokasi Umum (DAU) (Variabel Independen)	Menurut UU No. 23 Tahun 2014, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Sumber data DAU adalah Laporan realisasi APBD periode 2013-2017.	Rupiah
Jumlah Penduduk (JP) (Variabel Independen)	Penduduk adalah semua orang yang berdomisili dalam wilayah geografis Republik Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih dan atau dalam kurun waktu 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Sumber data Jumlah Penduduk adalah Laporan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin periode 1993-2018.	Jiwa
Belanja daerah (Variabel Dependen)	Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun	Sumber data Belanja daerah adalah Laporan realisasi APBD periode 2013-2017.	Rupiah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data	Satuan
	anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.		

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 JP + e$$

Keterangan:

- BD : Belanja daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
JP : Jumlah Penduduk
 α : Konstanta
 β : Koefisien regresi
e : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil statistik deskriptif yang ditunjukkan didalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Var.	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
PAD	95.192.786.972	1.791.886.378.674	287.642.257.777	210.035.612.800
DAU	358.331.867.000	1.398.539.653.000	894.940.013.602	240.693.095.331
JP	119.879	2.698.401	1.055.206	493.523
BD	529.237.634.485	4.328.942.647.441	1.752.622.383.449	616.575.119.152

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Pada tabel 4.2 hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel dari penelitian ini adalah 175 kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dengan total 5 tahun pengamatan. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pada variabel PAD nilai minimum variabel tersebut adalah sebesar Rp95.192.786.972, nilai minimum PAD tersebut merupakan nilai PAD kabupaten Blora pada tahun 2013,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sementara itu nilai maksimum variabel PAD adalah sebesar Rp1.791.886.378.674, nilai maksimum ini adalah nilai yang dimiliki oleh kota Semarang pada tahun 2017. Dengan periode pengamatan sebanyak 5 tahun, yang dimulai pada tahun 2013-2017, nilai rata-rata variabel PAD adalah sebesar Rp287.642.257.777. Sebaran data pada penelitian ini ditunjukkan dengan nilai deviasi standar sebesar Rp210.035.612.800.

Terkait hasil uji statistik deskriptif variabel DAU, nilai minimum variabel tersebut adalah sebesar Rp358.331.867.000, nilai ini merupakan nilai yang dimiliki oleh kota Salatiga pada tahun 2013. Nilai maksimum yang ditunjukkan dalam tabel diatas adalah sebesar Rp1.398.539.653.000 pada kabupaten Banyumas dengan periode pengujian 2016. Nilai rata-rata DAU pada provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 adalah sebesar Rp894.940.013.602. Sementara itu, nilai deviasi standar variabel DAU pada periode pengujian 5 tahun adalah sebesar Rp240.693.095.331.

Hasil pengujian pada variabel jumlah penduduk menunjukkan bahwa setelah dilakukan pengujian statistik deksriptif, nilai minimum variabel tersebut adalah sebesar 119.879 jiwa pada kota Magelang di tahun 2013. Nilai maksimum variabel jumlah penduduk adalah sebesar 2.698.401 jiwa, nilai ini dimiliki oleh kota Brebes pada tahun pengujian 2017. Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 1.055.206 jiwa. Nilai deviasi standar pada jumlah penduduk adalah sebesar 493.523.

Pada pengujian terhadap variabel belanja daerah, hasil pengujian menunjukkan nilai minimum yang dimiliki oleh variabel ini adalah sebesar Rp529.237.634.485 pada kota Salatiga tahun 2013. Nilai maksimum variabel belanja daerah ini adalah sebesar Rp4.328.942.647.441 yang dimiliki oleh kota

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Semarang pada tahun 2017. Nilai rata-rata belanja daerah adalah sebesar Rp1.752.622.383.449. Variabel belanja daerah memiliki nilai deviasi standar sebesar Rp616.575.119.152.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk semakin mendukung hasil yang didapatkan melalui pengolahan dan pengujian data penelitian agar benar merepresentasikan data yang telah memenuhi syarat. Oleh sebab itu telah dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas terhadap data. Melihat hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6, dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal, tidak terdapat masalah multikolinearitas, dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, tetapi terdapat masalah autokorelasi pada data yang digunakan untuk mendukung penelitian.

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstd. Residual</i>	Keterangan
<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	0,200	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
PAD	0,749	1,336	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU	0,142	7,035	Tidak terjadi multikolinearitas
JP	0,151	6,637	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 5.1
Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model	Durbin-Watson
1	1,531

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 5.2
Hasil Uji Autokorelasi Run Test

	<i>Unstd. Residual</i>	Keterangan
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,028	Terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.	Keterangan
Ln_PAD	0,996	0,321	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ln_DAU	0,304	0,762	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ln_JP	0,096	0,924	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis, setelah dilakukan pengolahan dan pengujian data didapatkan hasil seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Variabel	Koef. Regresi	t	Sig.
1	Constant	-2,224	-1,986	0,049
	Ln_PAD	0,275	18,270	0,000
	Ln_DAU	0,824	15,329	0,000
	Ln_JP	0,037	1,438	0,152

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Melihat kepada tabel 7 diatas, maka persamaan regresi yang didapatkan setelah dilakukan pengujian dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

$$BD = -2,224 + 0,275 PAD + 0,824 DAU + 0,037 JP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi yang didapatkan setelah dilakukan pengolahan terhadap data, maka persamaan diatas dapat diartikan bahwa merujuk kepada konstanta -2,224, apabila variabel PAD, DAU, dan JP dianggap konstan, maka akan terjadi perubahan yang terjadi kepada belanja daerah, yaitu penurunan nilai belanja daerah sebesar -2,224. Selanjutnya koefisien pada variabel PAD adalah sebesar 0,275, jika PAD mengalami peningkatan sebesar 1% dan variabel lainnya tetap atau tidak mengalami perubahan, maka nilai belanja daerah akan meningkat sebesar 0,275 atau sebesar 27,5%. Pada variabel DAU didapatkan nilai koefisien sebesar 0,824, apabila variabel DAU bertambah sebesar 1%, dengan anggaran variabel lain dalam persamaan adalah tetap maka, belanja daerah akan menerima dampak peningkatan nilai variabel DAU sebesar 0,824 atau sebesar 82,4%. Pada persamaan regresi ini, nilai koefisien variabel JP menunjukkan hasil sebesar 0,037. Apabila terjadi peningkatan nilai JP sebesar 1%, tetapi variabel lain dalam persamaan regresi nilai yang dimiliki adalah dianggap tetap, maka besar nilai belanja daerah akan menurun sebesar 0,037 atau sebesar 3,7%, dengan nilai belanja daerah sebesar -2,187.

Uji Statistik t

Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka secara parsial variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dan pengolahan data ditunjukkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam tabel 7, berdasarkan hasil tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa variabel PAD, DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, tetapi variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Uji Statistik F

Uji statistik F adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model apakah benar setidaknya terdapat salah satu dari variabel independen yang diteliti dalam penelitian berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Pengambilan keputusan dalam hipotesis penelitian diterima jika $p\text{-value} < 0,05$. Merujuk kepada tabel 7 ditunjukkan bahwa setidaknya terdapat salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu koefisien yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh yang dimiliki oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika dihadirkan dalam bentuk angka, nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Setelah dilakukan pengujian dan pengolahan data, hasil pengujian ditunjukkan dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8.
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,951	0,950

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2019)

Nilai yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 0,951 bermakna bahwa variasi yang berkaitan dengan naik turunnya variabel belanja daerah adalah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sebesar 95,1% yang penyebab variasi yang terjadi dapat dijawab atau terjadi karena pengaruh yang dimiliki oleh variabel PAD, DAU, dan JP, sementara 4,9% sisa tersebut disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk kedalam variabel yang digunakan dalam penelitian.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian dan pengolahan data menunjukkan bahwa PAD pada periode pengamatan 2013-2017 memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Mengacu kepada hasil pengujian dan pengolahan data, hipotesis yang telah dinyatakan sebelumnya, dinyatakan diterima. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007), Masdjojo dan Sukartono (2009), Iskandar (2012), dan Solikin (2016) menunjukkan kesamaan hasil bahwa PAD secara signifikan berpengaruh kepada belanja daerah seperti yang diuji oleh peneliti.

PAD adalah suatu sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi dan kemampuan masing-masing daerah, yang nilainya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang lain namun sah. Pengaruh PAD secara positif dan signifikan kepada belanja daerah menunjukkan apabila PAD mengalami peningkatan dalam hal nilai, maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan nilai. Pengaruh PAD kepada belanja daerah menunjukkan ruang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan tujuan pencapaian layanan publik yang meningkat dan efisien.

Belanja daerah yang terpengaruh oleh PAD dapat diartikan bahwa pemerintah dalam melakukan penggalian potensi dan kemampuan daerah telah dilaksanakan dengan maksimal, secara spesifik melalui penguatan pajak daerah dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

retribusi daerah dengan maksud melakukan peningkatan fungsi akuntabilitas fiskal daerah dan pengotimalisasian sumber daya yang terbatas dengan prinsip berkelanjutan dalam rangka pemenuhan desentralisasi, karena hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota telah melakukan segala cara untuk melakukan optimalisasi pendapatan yang berasal dari masyarakat dan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan belanjanya, tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota berniat untuk mewujudkan kemandirian daerah dan mewujudkan kebijakan otonomi dengan sadar.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Oleh sebab itu mengacu kepada hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007), Iskandar (2012), Muid dan Saputri (2014), Ernayani (2017) yang juga mendapatkan hasil bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, dalam sisi kepercayaan, DAU menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah pusat dalam hal penggunaan dana transfer yang diterima dari pusat. Kepercayaan besar yang diterima ini karena penggunaan DAU tidak diatur oleh pemerintah pusat, dan DAU menjadi sebuah dana yang kendali penggunaannya benar-benar berada di tangan pemerintah daerah, umumnya penggunaan DAU oleh pemerintah daerah didasarkan atas prioritas dan kebutuhan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

daerah dengan maksud untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu tujuan pemberian DAU kepada pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan terjadinya pemerataan kemampuan keuangan antardaerah sehingga daerah mampu untuk mendanai dan memenuhi kebutuhannya bersamaan dengan pelaksanaan desentralisasi. Pengaruh yang dimiliki DAU kepada belanja daerah dapat terwujud karena pemberian DAU mempertimbangkan dua aspek yaitu mempertimbangkan kebutuhan dan juga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Sehingga daerah yang potensi fiskal yang dimilikinya bernilai kecil, namun kebutuhan fiskal yang dimiliki besar alokasi DAU yang diterima akan relatif besar. Nilai pengalokasian DAU akan berbeda apabila suatu daerah dengan potensi fiskal yang relatif besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, DAU yang diterima akan bernilai relatif kecil (Mulya dan Bustamam, 2016).

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah

Jumlah penduduk sebagai variabel independen dalam penelitian tidak memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah, kesimpulan ini didasarkan atas pengolahan dan pengujian data yang telah dilakukan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah hipotesis ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sasana (2011) dan Fitriana dan Sudarti (2018) dikarenakan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja daerah, namun sesuai dengan hasil penelitian oleh Devita, Delis, dan Junaidi (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh kepada belanja daerah diprovinsi Jambi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil pengolahan dan pengujian data menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada nilai jumlah penduduk, maka akan terjadi peningkatan nilai pada belanja daerah. Apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka belanja daerah akan mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang tidak berpengaruh kepada belanja daerah merujuk pada teori kompetisi oleh Emile Durkheim yang menyatakan bahwa suatu negara atau wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dapat menimbulkan suatu kompetisi dalam mempertahankan hidup, yang dalam usahanya untuk bertahan hidup, diiringi dengan peningkatan spesialisasi tertentu. Hal ini berarti dalam periode pengamatan penelitian tingkat kompetisi penduduk pada provinsi Jawa Tengah belum cukup tinggi dan peningkatan spesialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya yang belum berorientasi untuk ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan untuk bertahan hidup belum cukup memberikan hasil yang efektif bila dilihat dalam sisi sumbangan nilai yang dapat diberikan kepada belanja daerah.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh United Nations (2011) dengan judul *Seven Billion and Growing: The Role of Population Policy in Achieving Sustainability* menjelaskan bahwa banyaknya jumlah penduduk juga menunjukkan potensi kinerja dan banyaknya penduduk dalam umur produktif dengan rentang usia 15 tahun sampai 64 tahun juga dapat membantu suatu daerah untuk mencapai potensi ekonomi yang maksimal. Hal ini juga mempunyai sisi lain yaitu, besarnya jumlah penduduk suatu daerah juga dapat menjadi beban bagi daerah tersebut, apabila komposisi dari penduduk tersebut lebih banyak disusun oleh penduduk dibawah usia produktif, yang berarti masih belum dapat menyumbangkan potensinya kepada daerah. Sehingga pendapatan daerah yang menjadi salah satu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagian dari belanja daerah belum cukup optimal karena jumlah penduduk dengan usia produktif lebih sedikit bila dibandingkan kepada penduduk dengan usia tidak produktif. Belanja daerah yang tidak terpengaruh oleh jumlah penduduk berarti telah terjadi penurunan dari sisi mortalitas yang bersamaan dengan penurunan fertilitas yang terjadi diantara penduduk.

Analisis *Flypaper Effect*

Analisis *flypaper effect* yang dilakukan berfokus pada provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien PAD pada model regresi adalah sebesar 0,275 dengan nilai koefisien DAU 0,824. Dapat diartikan dengan melihat nilai koefisien DAU yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai koefisien PAD pada model regresi tersebut, menunjukkan terjadinya *flypaper effect* pada provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2017. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maimunah (2006), Masdjojo dan Sukartono (2009) dan Oktavia (2014).

Flypaper effect yang terjadi pada periode penelitian yaitu tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dalam mendanai keperluan belanja daerahnya bergantung lebih banyak kepada dana transfer lebih spesifik kepada DAU daripada bergantung pada pendapatan yang didapatkan berdasarkan potensi daerah yaitu PAD. Hal yang menyebabkan belanja daerah lebih merespon kepada DAU diakibatkan oleh DAU sebagai bagian dari dana perimbangan dengan nilai yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PAD, ataupun DBH dan DAK (Masdjojo dan Sukartono, 2009).

Fenomena *flypaper effect* hadir secara tidak langsung sebagai suatu konsekuensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam prosesnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

meminimumkan ketimpangan fiskal yang terjadi antardaerah dan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pengoptimalisasian PAD sebagai pendapatan utama daerah dan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal penyelenggaraan kegiatan rutin dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat daerahnya.

KESIMPULAN

PAD secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Simpulan selanjutnya yang didapatkan dalam penelitian adalah DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Jumlah penduduk tidak menunjukkan hubungan positif terhadap belanja daerah, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya peningkatan ataupun penurunan nilai jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja daerah secara langsung. Terdapat bukti bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota pada provinsi Jawa Tengah dengan periode 2013-2017.

KETERBATASAN

Keterbatasan yang muncul saat penelitian dilaksanakan adalah periode pengujian terbatas kepada tahun anggaran 2017 dan tidak dilakukan pengujian terhadap tahun anggaran 2018. Hal ini disebabkan oleh sumber data terkait nilai PAD, DAU, dan belanja daerah yakni laporan realisasi APBD belum tersedia secara utuh untuk 1 tahun anggaran, namun yang tersedia dan telah dipublikasikan adalah laporan realisasi APBD untuk semester I tahun 2018. Keterbatasan selanjutnya adalah terdapat autokorelasi dalam data yang digunakan untuk mendukung penelitian,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

autokorelasi hadir dalam data disebabkan oleh penggunaan data panel dalam penelitian.

SARAN

Melakukan penambahan periode penelitian sampai dengan tahun terkini dilakukannya penelitian dan melakukan penambahan populasi yang digunakan untuk menunjang penelitian. Saran selanjutnya adalah menambah variabel penelitian yang berasal dari seluruh dana perimbangan untuk melihat dampak dari dana perimbangan yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.
- Amalia, F. (2015). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Amalia, F. (2017). Flypaper Effect of Regional Expenditures and It's Impact to Regional Inequality in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Aprilla, N., & Saputra, R. A. (2013). Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Armawadin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2018). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- BPS Jawa Tengah. (2019, Mei 14). Retrieved from BPS Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id>
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*.